

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012).
- Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Penjelasannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, 2018).

### **Jurnal Nasional:**

- S. Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)", *Hikmah*, Vol. 15 Nomor 1 Januari-Juni 2018. 63-71.

### **Hasil Penelitian:**

- Purwoko, "Peranan IPEDA Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya". Skripsi, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1982.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1860).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12).

**Putusan:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2018/PN Kbm.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor Putusan Nomor: 221/Pdt/2019/PT SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Nomor: 649 K/PDT/2020.

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).